

Sumatra Selatan: Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Oleh Sonya Dewi, Andree Ekadinata, Beria Leimona, Suyanto

Ekonomi hijau adalah perekonomian berbasis lahan seperti agroforestri, pertanian, kehutanan beserta turunannya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen untuk mengambil peranan terdepan dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Pada tahun 2013, kontribusi sektor berbasis lahan di Sumatera Selatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebesar 17.28% dan telah menopang kehidupan 1.33 juta rumah tangga. Pada prinsipnya, Pertumbuhan Ekonomi Hijau memungkinkan untuk dicapai melalui peningkatan produksi sektor pertanian dan kehutanan secara berkelanjutan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyedia jasa lingkungan. Prinsip tersebut hanya dapat diwujudkan melalui penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, pemerhati konservasi dan masyarakat umum. Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mencapai ekonomi hijau Sumatra Selatan, ICRAF ikut berperan dalam penyusunan dokumen Rencana Induk yang berisi pendekatan, strategi dan Peta Jalan untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2030.

Ruang lingkup Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan adalah sektor sumber daya terbarukan yang memfokuskan pada peningkatan kontribusi komoditas unggulan yaitu: kopi, karet, kelapa sawit, padi dan kayu pulp sebagai bahan baku kertas. Dengan mengacu pada kelima capaian yang diinginkan dari Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan tersebut, maka dihasilkan 17 indikator Pertumbuhan Ekonomi Hijau pada tingkat provinsi.

Visi dan ruang lingkup Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan

Visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan mencakup lima capaian yang diadopsi dari capaian nasional yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
2. Pertumbuhan yang inklusif dan merata
3. Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan
4. Ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan
5. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pendekatan Penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau merupakan titik temu antara rencana tata ruang dan tata guna lahan dengan rencana pembangunan yang berdampak lingkungan rendah, pertumbuhan ekonomi sesuai target capaian, dan keterlibatan para pihak. Pendekatan yang diambil dalam menyusun Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan didasarkan pada tiga prinsip yaitu: (1) inklusivitas (melibatkan berbagai pihak), (2) integrasi (keterpaduan) dan sinkronisasi (keselarasan), dan (3) berlandaskan data yang sah. Prinsip inklusivitas diterapkan ketika parapihak terkait terlibat secara aktif dalam proses pembuatan dan negosiasi skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau sehingga aspirasi, kekhawatiran maupun hambatan dapat dikenali sejak awal. Prinsip integrasi dan sinkronisasi dilakukan dengan memadukan dan menyelaraskan antar program maupun kegiatan secara keruangan, waktu, penganggaran dan kelembagaan. Data, informasi dan pemodelan yang sah mutlak diperlukan agar proyeksi dampak yang dihasilkan dari sebuah skenario pembangunan dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Perangkat LUMENS (Land Use Planning for Environmental Services) yang dibangun oleh ICRAF adalah pemodelan yang digunakan untuk memproyeksi dampak tersebut.

Strategi dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan

Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan terdiri dari tujuh strategi, yaitu:

Strategi 1: Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan yang merupakan penyelarasan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan;

Strategi 2: Peningkatan akses masyarakat terhadap modal yang berhubungan dengan penghidupan;

Strategi 3: Peningkatan produktivitas dan diversifikasi;

Strategi 4: Perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil;

Strategi 5: Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi;

Strategi 6: Restorasi lahan dan hutan terdegradasi; dan

Strategi 7: Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

Strategi 1 menguraikan dan mempertajam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan agar mampu memberikan indikasi lokasi untuk pelaksanaan keenam strategi lainnya. Strategi ini berusaha menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan akan lahan dengan perbaikan kualitas lingkungan. Ekspansi lahan dialokasikan pada area yang sesuai dan berdampak lingkungan kecil dengan memperhatikan area yang harus dilindungi untuk menghindari kerusakan lingkungan dan peningkatan emisi GRK.

Strategi 2 dan 3 menargetkan petani sebagai kelompok utama penerima manfaat. Tujuan kedua strategi ini adalah meningkatkan pendapatan dan penghidupan melalui perbaikan prasarana, sarana dan modal penghidupan. Kedua strategi ini berkontribusi terhadap capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan ketahanan (*resilience*) petani terhadap fluktuasi harga dan musim, tetapi mampu menurunkan emisi GRK.

Strategi 4 dan 5 pada dasarnya mendorong adanya rantai pasar maupun rantai nilai yang lebih efektif dan adil dalam pembagian manfaat antara petani, pedagang dan industri hilir. Keberadaan industri hilir ini berdampak pada ketahanan terhadap fluktuasi harga bahan mentah meningkat. Kedua strategi tersebut juga memfokuskan pada penambahan nilai bagi penghasil bahan baku sehingga manfaatnya dapat dinikmati di tingkat lokal; dan memacu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan PDRB serta pemerataan.

Strategi 6 berupaya untuk memulihkan fungsi ekologis dan ekonomis suatu ekosistem tertentu yang telah dialokasikan pada suatu area. Strategi ini tidak terbatas pada pengembalian struktur dan fungsi ekologis hutan dari suatu area yang terdegradasi, tetapi juga mencakup revitalisasi penghidupan.

Strategi 7 merupakan strategi inovatif, karena mekanisme insentif jasa lingkungan belum banyak dipraktikkan. Strategi ini bertujuan untuk menurunkan emisi GRK sekaligus menjaga kualitas jasa lingkungan.

Peta Jalan untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan memetakan ketujuh strategi di atas

menjadi 52 butir intervensi. Intervensi tersebut kemudian dipetakan secara spasial, disertai dengan kebijakan dan kondisi pendukung lainnya. Selanjutnya, intervensi dirinci menjadi rencana kerja pada rentang waktu antara tahun 2017-2030 sesuai dengan periode rencana pembangunan hijau Sumatera Selatan. Selain itu, Peta Jalan ini juga memberikan gambaran tentang indikator, para pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan dan estimasi biayanya.

Proyeksi Dampak Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan

Dampak Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan memang belum dapat diketahui, tetapi memungkinkan untuk diproyeksikan. Dua skenario, yaitu: (1) berdasarkan skenario *business as usual* (BAU) dan (2) Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau dikembangkan di Sumatera Selatan untuk memproyeksikan dampaknya. Indikator yang digunakan dalam memproyeksikan dampak Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini adalah emisi dan PDRB.

Berdasarkan skenario BAU, hutan produksi masih menjadi sumber emisi terbesar hingga tahun 2030. Namun, berdasarkan skenario Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Sumatera Selatan diproyeksikan mampu menurunkan emisi GRK sebesar 22%, tanpa memperhitungkan emisi dari kebakaran. Hingga tahun 2030, emisi bersih di hutan produksi diproyeksikan negatif atau terjadi sequestrasi karbon lebih besar dari emisinya. Melalui Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini, keanekaragaman hayati di tingkat bentang lahan dapat terjaga dengan mempertahankan konektivitas antara hutan lahan kering dan mangrove dengan bentang lahan di sekitarnya.

Dalam hal PDRB, strategi alokasi ekspansi area komoditi dengan mempertimbangkan ketersediaan dan status lahan, termasuk HCV (*High Conservation Value*) dan HCS (*High Conservation Status*), perijinan, regulasi, kesesuaian lahan dan lainnya seperti dalam skenario Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau proyeksi PDRB lebih rendah dari BAU selama dua periode, tetapi pada tahun 2030 proyeksi PDRB setara dengan BAU.

Apabila strategi ekspansi disandingkan dengan strategi peningkatan produktivitas dan manfaat per unit area, misalnya dengan intensifikasi, praktik pertanian yang baik dan agroforestri, maka akan dicapai peningkatan PDRB sebesar 3% dari BAU pada akhir periode 2030. Jika rantai nilai diperbaiki melalui akses pasar, peningkatan skala ekonomi dan pembangunan fasilitas pengolahan (industri hilir), PDRB diproyeksikan meningkat 6.4% dari BAU, karena adanya efek pengganda (*multiplier effect*). Peningkatan tersebut berdasarkan pada skenario dengan intervensi industri hilir untuk tiga komoditi utama Sumatera Selatan yaitu: kopi, karet dan kelapa sawit.

Langkah ke depan

Secara global, sosialisasi dan komunikasi mengenai Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau sangat penting untuk mewujudkan visi bersama para pihak, mendapatkan dukungan dari luar maupun dari dalam serta menggalang kemitraan dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini merupakan prioritas jangka panjang yang selayaknya dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dan diarusutamakan ke dalam RPJM maupun RTRW. Dokumen Rencana Induk ini dapat menjadi bagian integral dalam penyusunan RPJM berikutnya. Di Sumatera Selatan, Peraturan Gubernur No. 16 tahun 2017 tentang kelembagaan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan kelembagaan kemitraan pengelolaan bentang lahan menjadi landasan pelaksanaan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan telah ditandatangani dan diluncurkan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Bulan Mei 2017 di Palembang dalam forum Bonn Challenge Wilayah Asia. Pada forum tersebut, pemerintah Sumatera Selatan telah berhasil mengajak seluruh provinsi lain di Pulau Sumatera untuk menyusun strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau.